

TATA KELOLA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KRISIS AIR DI KELURAHAN ALAK

Naviana Lasviani Mamu¹, Yakup Ole Ate², Aresto Nge³, Kaisar Y. J. L. Laot Bahy⁴, Marselina Kause⁵, Lasarus Jehamat⁶, Yeheskiel A. Roen⁷, Helga Maria E. Gero⁸

12345678 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available Januari 2026

navianalasvianimamu@gmail.com,

yakubatte@gmail.com,

kaiseryoseph@gmail.com,

marselinakause39@gmail.com,

ngearesto@gmail.com,

lasarusjehamat@staf.undana.ac.id,

yeheskielroen@staf.undana.ac.id,

helgagero@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola masyarakat dan peran pemerintah dalam mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Krisis air yang terjadi dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya air, kondisi geografis, serta belum optimalnya pengelolaan dan distribusi air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat, peran pemerintah, serta mekanisme kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor kunci yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat melalui musyawarah RT/RW, pemeliharaan sumur komunitas, serta pengelolaan distribusi air secara kolektif berkontribusi signifikan terhadap efektivitas dan keberlanjutan layanan air bersih. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator kebijakan, serta penyedia dukungan infrastruktur, sementara

lembaga non-pemerintah mendukung penguatan kapasitas teknis dan edukasi masyarakat. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung membentuk sistem tata kelola air yang adaptif, responsif terhadap kondisi lokal, dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis air. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat komunitas.

Kata Kunci: Tata kelola air, partisipasi masyarakat, krisis air, kolaborasi pemerintah masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze community governance and the role of government in addressing the clean water crisis in Alak District, Kota Kupang. The water crisis is influenced by limited water resources, geographical conditions, and suboptimal water management and distribution systems. Employing a qualitative case study approach, this research explores in depth the dynamics of community participation, government roles, and cross-sector collaboration mechanisms in water resource management. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving key stakeholders. The findings reveal that active community engagement through neighborhood deliberations, communal well maintenance, and collective water distribution management significantly enhances the effectiveness and sustainability of clean water services. The government acts as a facilitator, policy regulator, and infrastructure provider, while non-governmental organizations support technical capacity building and community education. The synergy among community members, government institutions, and supporting organizations creates an adaptive and locally responsive water governance system

*Corresponding author

E-mail addresses: navianalasvianimamu@gmail.com

that strengthens community resilience to water scarcity. These findings highlight the importance of participatory and data-driven strategies in community-level water resource management.

Keywords: *Water governance; community participation; water crisis; government-community collaboration*

1. PENDAHULUAN

Krisis air merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin mendesak di berbagai belahan dunia akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Dampak krisis air tidak hanya terlihat pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan ketahanan sosial, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan (Supratman et al., 2025). Fenomena kekurangan air bersih tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan yang secara geografis relatif subur. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tata kelola air yang efektif memerlukan strategi adaptif dan partisipatif, yang memperhitungkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat agar pelayanan air bersih dapat berjalan berkelanjutan (Junaeny, 2025).

Di tingkat lokal, Kecamatan Alak menjadi contoh nyata kompleksitas permasalahan krisis air. Hasil wawancara pra-penelitian menunjukkan bahwa warga sering mengalami gangguan pasokan air, terutama pada musim kemarau, dengan beberapa sumur warga yang mengering dan distribusi PDAM yang tidak merata. Kondisi ini memaksa masyarakat mencari alternatif sumber air, seperti menampung air hujan atau membeli air galon, yang menimbulkan beban ekonomi tambahan dan risiko kesehatan akibat penggunaan air yang tidak higienis (Supratman et al., 2025). Krisis air bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan tata kelola dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan warga dalam pengelolaan air berbasis komunitas terbukti meningkatkan efektivitas layanan, karena masyarakat dilibatkan tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi program, sehingga kebutuhan lokal dapat terakomodasi dalam kebijakan yang diambil (Junaeny, 2025).

Tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kearifan lokal juga memainkan peran penting. Sistem yang adaptif terhadap nilai-nilai dan praktik lokal mampu menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kondisi lingkungan, sehingga ketahanan air di tingkat komunitas dapat terjaga (Safira & Ekasari, 2025). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah juga menjadi strategi penting. Studi menunjukkan bahwa sinergi ini dapat memperkuat kapasitas infrastruktur, meningkatkan mitigasi risiko kekurangan air, dan menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap ketahanan air jangka panjang (Supratman et al., 2025). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi berbasis data spasial memungkinkan perencanaan distribusi air yang lebih tepat sasaran, monitoring sumber daya secara real time, serta meningkatkan efisiensi layanan publik (Dita et al., 2021).

Krisis air bersih merupakan salah satu permasalahan mendasar yang hingga kini masih dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Alak. Keterbatasan ketersediaan air bersih tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan sanitasi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Kondisi geografis, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta lemahnya sistem pengelolaan sumber daya air menjadi faktor yang memperparah krisis ini. Oleh karena itu, upaya penanganan krisis air tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan teknis semata, melainkan memerlukan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor secara kolaboratif.

Tata kelola sumber daya air yang efektif menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna utama air bersih. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan air. Pendekatan



seperti Participatory Action Research (PAR) memungkinkan masyarakat untuk berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan, dalam proses pengelolaan air bersih. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya mampu meningkatkan kesadaran, rasa memiliki, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan (Corsita et al., 2024; Kosat et al., 2025).

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kerangka kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan krisis air. Pendekatan tata kelola kolaboratif terbukti mampu mengurangi beban krisis air di tingkat lokal, terutama ketika pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO). Contohnya, pembangunan sumur resapan, program penghijauan, serta penguatan kelembagaan lokal yang dilakukan secara bersama-sama dapat meningkatkan ketersediaan air sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Kosat et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra masyarakat.

Selain aspek kelembagaan dan infrastruktur, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan dan konservasi air juga menjadi faktor penting dalam mengatasi krisis air. Program edukasi yang menekankan pentingnya air bersih, sanitasi, serta penggunaan air secara bijak dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang pengelolaan sumber daya air cenderung lebih aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan pemerintah (Sadewa et al., 2022).

Pengelolaan krisis air di Kecamatan Alak menuntut kolaborasi yang sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama, karena warga tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya air secara lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program berbasis komunitas, seperti PAMSIMAS, mampu meningkatkan efektivitas distribusi air bersih, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta meminimalkan konflik lokal terkait penggunaan air (Rumihin, 2024). Dengan demikian, strategi pengelolaan air yang efektif harus menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Selain partisipasi masyarakat, kerangka kebijakan dan pendidikan yang terintegrasi juga memainkan peran penting dalam penanganan krisis air. Penelitian Hafeez et al. (2025) menekankan perlunya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan air. Tanpa koordinasi ini, kualitas dan ketersediaan air dapat terus menurun, yang berpotensi meningkatkan risiko kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan di wilayah yang terdampak. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan air tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan sistemik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam konteks implementasi strategi pemerintah, pemantauan sumber air secara berkelanjutan, konservasi, dan penggunaan teknologi informasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan air bersih. Taufik et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air yang efektif memerlukan kombinasi antara regulasi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan serta pemanfaatan sumber air. Di Kecamatan Alak, hal ini dapat diwujudkan melalui sistem pengawasan sumber air yang terintegrasi dengan program edukasi dan pelibatan warga dalam kegiatan konservasi. Penelitian oleh Syafeie & Azmi (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem basis data digital dan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efisiensi tata kelola air, mempermudah distribusi, dan memberikan akses yang lebih merata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Kennedy et al. (2024), yang menekankan pentingnya edukasi dan



kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya, serta mengoptimalkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada ketersediaan air bersih.

Dengan demikian, upaya penanganan krisis air di Kecamatan Alak harus mengintegrasikan berbagai aspek: kolaborasi masyarakat-pemerintah, kebijakan yang responsif dan berbasis data, serta edukasi masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pendekatan yang holistik ini tidak hanya akan meningkatkan akses air bersih, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis lingkungan yang semakin kompleks.

2. METODE

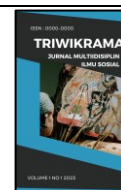
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tata kelola masyarakat serta peran pemerintah dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri proses sosial, pola interaksi, serta dinamika pengambilan keputusan yang berlangsung dalam konteks lokal secara alamiah. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan penekanan analisis pada makna daripada generalisasi. Sejalan dengan itu, Arikunto (2013) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang relevan dengan konteks penelitian. Desain studi kasus dipandang tepat karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem yang terikat (*bounded system*), dalam hal ini praktik tata kelola dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Alak, Kota Kupang, yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap krisis air bersih, terutama pada musim kemarau. Lokasi ini dipilih secara purposif karena tingginya frekuensi gangguan distribusi air bersih serta adanya berbagai program dan inisiatif pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Alak sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik tata kelola air dan peran aktor-aktor yang terlibat.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap warga, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, perwakilan PDAM, serta organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan air, untuk menggali pandangan, pengalaman, serta strategi kolaboratif yang diterapkan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung proses distribusi air, pengelolaan sumber air komunitas, serta interaksi antarwarga dalam kegiatan pengelolaan air. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah, laporan PDAM, serta catatan program pengelolaan air berbasis komunitas sebagai bentuk triangulasi data.

Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dan pengalaman langsung dalam pengelolaan air bersih. Partisipan meliputi warga yang terlibat dalam pengelolaan air, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta perwakilan lembaga non-pemerintah. Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah partisipan yang telah berdomisili di Kelurahan Alak minimal lima tahun dan memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi serta mengelola persoalan krisis air di wilayah tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui tahapan transkripsi data wawancara, pengkodean awal, pengelompokan kode, serta identifikasi dan pengembangan tema-tema utama yang berkaitan dengan tata kelola masyarakat, peran pemerintah, dan mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan air. Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data,



sehingga hasil analisis diharapkan mampu merepresentasikan kondisi empiris secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Alak memiliki peran aktif dalam pengelolaan sumber daya air, terutama melalui kegiatan rutin seperti perawatan sumur komunitas dan pengelolaan penampungan air hujan. Seorang warga RT 05 menyatakan:

"Kami biasanya bergotong royong membersihkan sumur dan selokan, supaya air tetap bersih. Kalau tidak ikut, air cepat kotor dan banyak keluhan tetangga."

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program (Junaeny, 2025; Rumihin, 2024). Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memastikan pemeliharaan fisik sumber air, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga keberlanjutan pengelolaan air dapat terjaga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat juga bersifat strategis dalam perencanaan distribusi air. Salah seorang ketua RW menyampaikan:

"Kami sering diajak musyawarah oleh pihak kelurahan untuk menentukan jadwal distribusi air dari PDAM dan sumur komunitas. Dengan begitu, semua warga mendapat bagian yang adil."

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan air berbasis kolaborasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mitigasi konflik antarwarga dapat dilakukan secara proaktif.

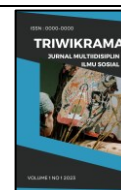
Pemerintah Kelurahan Alak memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan air, terutama melalui regulasi, penyediaan fasilitas, dan koordinasi dengan masyarakat. Salah seorang aparat kelurahan menjelaskan:

"Kami memfasilitasi pertemuan rutin antara warga dan pihak PDAM, serta mengawasi pembangunan sumur komunitas. Pemerintah hanya memandu, tapi masyarakat yang menjaga dan merawatnya."

Pendekatan ini mencerminkan model tata kelola air yang partisipatif dan adaptif, sesuai dengan temuan Safira & Ekasari (2025) bahwa sistem yang responsif terhadap nilai dan praktik lokal menghasilkan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah juga memberikan kontribusi dalam hal pelatihan dan pendanaan infrastruktur, sehingga program pengelolaan air tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Meskipun kolaborasi berjalan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan fluktuasi pasokan air dari PDAM. Seorang warga menuturkan:

"Kalau musim kemarau, air dari PDAM sering mati. Kami harus menampung air dari sumur atau membeli galon. Kadang tidak cukup untuk semua kebutuhan sehari-hari."

Temuan ini memperkuat argumen literatur bahwa krisis air bukan hanya masalah teknis, tetapi juga sosial-ekonomi (Syafeie & Azmi, 2025). Keterbatasan akses memicu ketidaksetaraan distribusi, sehingga pengelolaan air harus dirancang secara strategis dengan memanfaatkan teknologi, misalnya pemetaan digital sumber air dan sistem penjadwalan distribusi yang berbasis data (Dita et al., 2021). Beberapa program di Kelurahan Alak mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola distribusi air dan memonitor kondisi sumber air. Seorang petugas PDAM menyebutkan:



"Kami menggunakan data digital untuk melihat kondisi sumur komunitas dan permintaan air tiap RT. Dengan begitu, kami bisa menyesuaikan distribusi agar tidak ada yang kekurangan."

Selain itu, edukasi masyarakat juga dilakukan secara berkala, termasuk sosialisasi cara menjaga kualitas air dan praktik konservasi air di rumah tangga. Temuan ini mendukung saran Kennedy et al. (2024) bahwa kesadaran dan edukasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan air di Kelurahan Alak sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung. Kolaborasi ini mencakup: peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan sumber air, koordinasi pemerintah dalam distribusi dan regulasi, serta dukungan lembaga non-pemerintah dalam pelatihan dan fasilitas. Sinergi ini membentuk sistem tata kelola air yang adaptif, responsif terhadap kondisi lokal, dan berpotensi meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap krisis air jangka panjang.

Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menuntut adanya sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung. Dalam konteks Kecamatan Alak, krisis air tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh tata kelola yang belum optimal. Pendekatan kolaboratif menjadi penting karena pengelolaan air merupakan persoalan publik yang melibatkan banyak kepentingan. Keberhasilan tata kelola air sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor terkait dalam membangun kerja sama yang saling melengkapi. Rudi (2023) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya berbasis kolaborasi merupakan fondasi penting dalam kebijakan publik yang berorientasi keberlanjutan. Pandangan ini diperkuat oleh Agatha (2025) yang menyatakan bahwa kolaborasi lintas aktor mampu meningkatkan kualitas layanan air minum secara signifikan.

Peran masyarakat menjadi elemen utama dalam pengelolaan air di tingkat lokal karena masyarakat merupakan pengguna langsung sumber daya tersebut. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pemanfaatan, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan pengawasan sumber air. Partisipasi aktif masyarakat menciptakan rasa memiliki yang mendorong tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan sumber daya air. Matlala (2025) menjelaskan bahwa praktik pemantauan berbasis warga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk air bersih. Hal ini sejalan dengan temuan Mustofa et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan air mampu memperkuat kelembagaan lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor pengelola.

Selain dalam aspek teknis, keterlibatan masyarakat juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah di tingkat RT/RW menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan terkait pengelolaan air. Proses ini meningkatkan legitimasi kebijakan karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Rudi (2023) menekankan bahwa partisipasi publik merupakan unsur penting dalam kebijakan berbasis kepentingan bersama. Pandangan tersebut diperkuat oleh Agatha (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan air yang inklusif lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat berkontribusi langsung terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan air.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengarah dan pengendali kebijakan pengelolaan air. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi, infrastruktur, serta dukungan administratif yang dibutuhkan masyarakat. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, kolaborasi antaraktor tidak akan berjalan secara optimal. Hakim et al. (2023) menyatakan bahwa collaborative governance memungkinkan pemerintah memperkuat sinergi perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan Rudi (2023) yang menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan keberlanjutan sumber daya melalui kebijakan publik. Dengan demikian, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator sekaligus regulator.



Pendekatan kebijakan yang partisipatif memungkinkan pemerintah dan masyarakat saling melengkapi peran masing-masing. Pemerintah tidak lagi bertindak secara top-down, melainkan membuka ruang dialog dengan masyarakat dan lembaga pendukung. Pola ini mendorong terciptanya kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan air. Agatha (2025) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Temuan serupa juga disampaikan oleh Cotler et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil memperkuat tata kelola lingkungan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, keterbukaan pemerintah menjadi kunci dalam membangun sinergi.

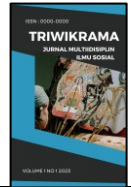
Lembaga pendukung, seperti organisasi non-pemerintah dan akademisi, memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Lembaga ini membantu menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang dapat dipahami masyarakat. Selain itu, mereka juga menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas lokal. Arianny dan Adisasmito (2024) menegaskan bahwa lembaga pendukung berperan penting dalam memperkuat implementasi kebijakan publik melalui kolaborasi lintas sektor. Pandangan ini diperkuat oleh Trenggana et al. (2025) yang menyatakan bahwa dukungan kelembagaan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, lembaga pendukung berfungsi sebagai katalisator perubahan.

Keberadaan lembaga pendukung juga membantu mendorong inovasi dalam pengelolaan air. Inovasi tersebut mencakup pengembangan sistem distribusi, pengelolaan sumber air alternatif, serta peningkatan kesadaran lingkungan. Kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Cotler et al. (2022) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil mampu menghadirkan pendekatan baru dalam tata kelola lingkungan. Hal ini sejalan dengan Mustofa et al. (2024) yang menekankan pentingnya inovasi berbasis kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya desa. Inovasi menjadi kunci adaptasi terhadap krisis air.

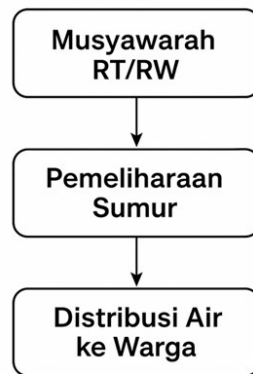
Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung menciptakan sistem tata kelola yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kolaborasi ini memungkinkan pengelolaan air yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Rudi (2023) menekankan bahwa tata kelola adaptif merupakan elemen penting dalam menghadapi risiko dan krisis. Pandangan ini diperkuat oleh Hakim et al. (2023) yang menyoroti pentingnya sinergi antaraktor dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi menjadi fondasi utama keberhasilan pengelolaan air.

Dalam konteks Kecamatan Alak, kolaborasi ini juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis air. Ketahanan tidak hanya diukur dari ketersediaan air, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola dan mempertahankan sumber daya tersebut. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Matlala (2025) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan layanan publik memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan Agatha (2025) yang menyatakan bahwa kolaborasi memperkuat keberlanjutan layanan air. Oleh karena itu, ketahanan masyarakat merupakan hasil dari proses tata kelola yang inklusif.

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan air tidak dapat dicapai melalui pendekatan sektoral semata. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung menjadi prasyarat utama dalam menghadapi krisis air. Setiap aktor memiliki peran strategis yang saling berkaitan dalam sistem tata kelola. Rudi (2023) menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam kebijakan publik berbasis keberlanjutan. Pandangan tersebut diperkuat oleh



Cotler et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, penguatan sinergi menjadi agenda penting dalam pengelolaan air di Kecamatan Alak.



Proses yang digambarkan mencerminkan urutan kegiatan yang dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW sebagai tahap perencanaan dan pengambilan keputusan secara kolektif. Musyawarah ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan warga terkait air bersih, menentukan prioritas, dan menyepakati langkah-langkah yang akan dilakukan. Dengan adanya musyawarah, warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapat, dan mencapai kesepakatan bersama sehingga program pemeliharaan sumur dapat berjalan dengan dukungan komunitas yang solid. Tahap ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Tahap berikutnya adalah pemeliharaan sumur, yang menjadi inti dari penyediaan air bersih. Aktivitas ini memastikan sumur tetap berfungsi optimal dan aman untuk digunakan. Setelah sumur terpelihara dengan baik, air kemudian didistribusikan ke warga sesuai kesepakatan dalam musyawarah. Distribusi air ini mencerminkan implementasi hasil keputusan bersama, sekaligus menunjukkan keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menekankan prinsip musyawarah-mufakat sebagai landasan pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, tata kelola air di Kelurahan Alak menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis air. Partisipasi aktif warga melalui musyawarah, pemeliharaan sumur komunitas, serta pengelolaan distribusi air memastikan keberlanjutan dan keadilan akses air bersih. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengatur kebijakan, sementara dukungan lembaga non-pemerintah memperkuat kapasitas teknis dan edukasi masyarakat. Sinergi ini menciptakan sistem tata kelola air yang adaptif, responsif terhadap kondisi lokal, dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kekurangan air, sehingga strategi partisipatif dan berbasis data menjadi landasan efektif dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat komunitas.

Saran



Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah Kota Kupang memperkuat kebijakan pengelolaan air bersih berbasis komunitas melalui dukungan regulatif, pendanaan yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan program dengan menyediakan pendampingan teknis, peningkatan kualitas infrastruktur air, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data agar distribusi air dapat berlangsung secara adil dan efisien, terutama pada musim kemarau.

Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui penguatan mekanisme musyawarah, pembentukan dan legalisasi kelompok pengelola air komunitas, serta pemberian edukasi berkelanjutan terkait konservasi dan pemeliharaan sumber daya air. Keterlibatan lembaga non-pemerintah juga perlu dioptimalkan sebagai mitra strategis dalam penguatan kapasitas teknis, inovasi pengelolaan air, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tata kelola air dengan pendekatan komparatif antarwilayah atau mengintegrasikan metode kuantitatif guna mengukur efektivitas kolaborasi antaraktor secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan air masyarakat serta merumuskan model tata kelola air berbasis komunitas yang adaptif dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, R. (2025). Collaborative governance dalam upaya peningkatan layanan air minum. *Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 185-198. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.427>
- Arianny, M., & Adisasmito, W. (2024). Collaborative governance in public health policy implementation: A literature review in the Southeast Asia region including Indonesia. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 5(7), 803-810. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i7.760>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Corsita, L., Marganingrum, D., & Iriyanto, S. (2024). Participatory action research method of drinking water supply framework innovation for local indigenous community in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 485, 04014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448504014>
- Cotler, H., Cuevas, M., Landa, R., & Frausto, J. (2022). Environmental governance in urban watersheds: The role of civil society organizations in Mexico. *Sustainability*, 14(2), 988. <https://doi.org/10.3390/su14020988>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dita, O., Liawati, L., Mayasari, R., Rahma, R., Jaman, J., & Putra, R. (2021). Implementasi sistem informasi masyarakat cerdas berbasis data spasial untuk pengelolaan data kependudukan di kelurahan karangpawitan kecamatan karawang barat kabupaten karawang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 5(2). <https://doi.org/10.36982/jam.v5i2.1891>
- Hafeez, M., Ahmed, M., Bukhari, S., Rehman, L., Faridi, M., Tooba, H., ... & Fatima, M. (2025). A synergistic imperative: an integrated policy and education framework for navigating the climate nexus. *IJSS*, 4(2), 118-124. <https://doi.org/10.63544/ijss.v4i2.135>
- Hakim, M., Qurbani, I., Kamal, M., W., M., & Utomo, M. (2023). Collaborative governance to strengthen synergy of village governance planning in the management of peatland based on green economy in Jambi Province. *Proceedings*, 26-32. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_4



- Junaeny, F. (2025). Policy evaluation of the community-based water and sanitation program (pamsimas) in tana tidung, north kalimantan: a qualitative study. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(3), 338-350. <https://doi.org/10.14710/jkli.74125>
- Kennedy, Ü., Bacaller, S., Moody, L., Hannah, S., Dahanayake, Y., & Third, A. (2024). "the earth is dying, bro". *M/C Journal*, 27(5). <https://doi.org/10.5204/mcj.3085>
- Kosat, M., Taus, W., & Fritantus, Y. (2025). Collaborative governance dalam penanganan krisis air bersih di Desa Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Kajian*, 2(1), 185-201. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.206>
- Matlala, L. (2025). The role of citizen-based monitoring practices in improving public service delivery in Africa: A review. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(11), 1-17. <https://doi.org/10.55214/2576-8484.v9i11.10753>
- Mustofa, A., Haryati, E., Syahadiyanti, L., & Kamariyah, S. (2024). Institutional development of village-owned enterprises in managing water resources and tourism villages through a stakeholder collaboration approach. *Nawala Education*, 1(3), 27-41. <https://doi.org/10.62872/x0tjt52>
- Rudi, S. (2023). Public policy in the concept of blue economy for anticipating disasters in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 70, 04002. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237004002>
- Rumihin, O. (2024). Water resources management in small islands: a review of public policy implementation in the development of lekloor reservoir, nomaha island. *baileofisip*, 1(3), 268-280. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss3pp268-280>
- Sadewa, A., Agustang, A., & Pertiwi, N. (2022). Model pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2). <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.2828>
- Safira, A. and Ekasari, A. (2025). Eksplorasi tata kelola masyarakat adat kampung kuta dalam pengelolaan air bersih. *Bandung Conference Series Urban & Regional Planning*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v5i2.20805>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supratman, S., Ilhamalimy, R., Septika, B., & Wulandari, Y. (2025). Pembangunan sosial untuk ketahanan air di desa pulau maringkik kecamatan keruak kabupaten lombok timur. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*, 4(4), 603-615. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4126>
- Syafeie, A. and Azmi, N. (2025). Transformation of village governance through digital database system: participatory action research approach in battembat village. *Transformasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 21(1), 226-246. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v21i1.13750>
- Taufik, M., Khairina, E., Hidayat, R., Kalalinggi, R., & Fadhlurrohman, M. (2022). Study of government's strategy on clean water availability in indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(1), 111-121. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.1.111-121>
- Trenggana, W., Muchtar, M., & Pundenswari, P. (2025). Enhancing public services through residential area management: A public administration study on the implementation of the regional development and housing plan (RP3KP). *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(1), 201-219. <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i1.1536>
- .